



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 26 Maret 2020

Nomor : C.26-30/V.61-10/99
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Pengunduran batas waktu
Pelaporan Penilaian Kinerja PNS
Pada SAPK (*e-Lapkin*)

Kepada Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
(*Daftar Terlampir*)

di

Tempat

Berkenaan dengan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor C.26-30/V 30-1/99 tanggal 5 Februari 2020 perihal Aplikasi Laporan Penilaian Kinerja PNS Pada SAPK (*e-Lapkin*) dan sebagaimana Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) No. B/2810/M.PAN-RB/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal Penilaian Prestasi Kerja PNS, bahwa pelaporan penilaian prestasi kerja PNS (PPK PNS) atau Penilaian Kinerja PNS dilaporkan kepada BKN paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

Menyikapi kondisi terkini terkait penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) yang semakin masiv dan sejalan dengan langkah untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai, maka telah diberlakukan kebijakan sebagian besar ASN bekerja dari rumah (Work From Home) dengan interaksi *online*. Hal ini akan berimplikasi pada pelaporan PPK PNS atau Penilaian Kinerja PNS dimaksud..

Sehubungan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa ***batas waktu pelaporan PPK PNS atau Penilaian Kinerja PNS diundur hingga akhir bulan Juni tahun 2020*** dengan tetap memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Informasi penilaian prestasi kerja PNS akan digunakan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan manajemen PNS mulai dari Rekrutmen PNS sampai dengan Pemberhentian PNS.

2. Apabila Instansi tidak melaporkan PPK PNS atau Penilaian Kinerja PNS, maka hal ini dapat berdampak pada terhambatnya proses pelayanan mutasi PNS yang bersangkutan.
3. Penginputan data Laporan PPK PNS atau Penilaian Kinerja PNS pada Instansi Daerah, tetap dikawal dan dipantau oleh Kantor Regional sesuai wilayah kerjanya.
4. Mengingat Laporan PPK PNS atau Penilaian Kinerja PNS sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai dari masing-masing instansi dan untuk mewujudkan pembinaan PNS, maka pelaporan dilaksanakan dengan tertib sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Deputi Bidang

Pembinaan/Manajemen Kepegawaian



Haryomo Dwi Putranto

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
4. Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Gaji, Kesejahteraan dan Tunjangan Kinerja BKN;
6. Direktur Pengolahan Data Kepegawaian BKN;
7. Kepala Kantor Regional I s/d XIV BKN.

Lampiran Surat Deputi Bidang
Pembinaan Manajemen Kepegawaian
Nomor : C.26-30/V.61-10/99
Tanggal : 26 Maret 2020

DAFTAR INSTANSI PUSAT DAN DAERAH

I. INSTANSI PUSAT

NO.	INSTANSI PUSAT
1	Arsip Nasional Republik Indonesia
2	Badan Informasi Geospasial
3	Badan Intelijen Negara
4	Badan Keamanan Laut RI
5	Badan Kepegawaian Negara
6	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
7	Badan Koordinasi Penanaman Modal
8	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
9	Badan Narkotika Nasional
10	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
11	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
12	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/Badan SAR Nasional
13	Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKI
14	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
15	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
16	Badan Pemeriksa Keuangan
17	Badan Pengawas Obat dan Makanan
18	Badan Pengawas Pemilihan Umum
19	Badan Pengawas Tenaga Nuklir
20	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
21	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
22	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
23	Badan Pusat Statistik
24	Badan Siber dan Sandi Negara/Lembaga Sandi Negara
25	Badan Standardisasi Nasional
26	Badan Tenaga Nuklir Nasional
27	Kejaksaan Agung
28	Kementerian Agama
29	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
30	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
31	Kementerian Dalam Negeri
32	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
33	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
34	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
35	Kementerian Kelautan dan Perikanan
36	Kementerian Kesehatan
37	Kementerian Ketenagakerjaan

38	Kementerian Keuangan
39	Kementerian Komunikasi dan Informatika
40	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
41	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
42	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
43	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
44	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
45	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
46	Kementerian Luar Negeri
47	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
48	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
49	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
50	Kementerian Pemuda dan Olahraga
51	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
52	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
53	Kementerian Perdagangan
54	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
55	Kementerian Perhubungan
56	Kementerian Perindustrian
57	Kementerian Pertahanan
58	Kementerian Pertanian
59	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
60	Kementerian Sekretariat Negara
61	Kementerian Sosial
62	Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI
63	Kepolisian Negara
64	Komisi Aparatur Sipil Negara
65	Lembaga Administrasi Negara
66	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
67	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
68	Lembaga Ketahanan Nasional RI
69	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
70	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
71	Mahkamah Agung RI
72	Ombudsman Republik Indonesia
73	Perpustakaan Nasional RI
74	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
75	Sekretariat Jenderal DPR RI
76	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
77	Sekretariat Jenderal MPR
78	Sekretariat Kabinet
79	Setjen Dewan Perwakilan Daerah
80	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi
81	Setjen Komisi Pemilihan Umum
82	Setjen Komisi Pengawas Persaingan Usaha
83	Setjen KOMNAS HAM
84	Setjen KORPRI
85	Setjen WANTANNAS

II. INSTANSI DAERAH

NO.	INSTANSI DAERAH	Wil. Kanreg BKN
1	Pemerintah Daerah D I Yogyakarta	01 KANREG YOGYAKARTA
2	Pemerintah Kab. Bantul	01
3	Pemerintah Kab. Sleman	01
4	Pemerintah Kab. Gunung Kidul	01
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	01
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	01
7	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	01
8	Pemerintah Kab. Semarang	01
9	Pemerintah Kab. Kendal	01
10	Pemerintah Kab. Demak	01
11	Pemerintah Kab. Grobogan	01
12	Pemerintah Kab. Pekalongan	01
13	Pemerintah Kab. Batang	01
14	Pemerintah Kab. Tegal	01
15	Pemerintah Kab. Brebes	01
16	Pemerintah Kab. Pati	01
17	Pemerintah Kab. Kudus	01
18	Pemerintah Kab. Pemasang	01
19	Pemerintah Kab. Jepara	01
20	Pemerintah Kab. Rembang	01
21	Pemerintah Kab. Blora	01
22	Pemerintah Kab. Banyumas	01
23	Pemerintah Kab. Cilacap	01
24	Pemerintah Kab. Purbalingga	01
25	Pemerintah Kab. Banjarnegara	01
26	Pemerintah Kab. Magelang	01
27	Pemerintah Kab. Temanggung	01
28	Pemerintah Kab. Wonosobo	01
29	Pemerintah Kab. Purworejo	01
30	Pemerintah Kab. Kebumen	01
31	Pemerintah Kab. Klaten	01
32	Pemerintah Kab. Boyolali	01
33	Pemerintah Kab. Sragen	01
34	Pemerintah Kab. Sukoharjo	01
35	Pemerintah Kab. Karanganyar	01
36	Pemerintah Kab. Wonogiri	01
37	Pemerintah Kota Semarang	01
38	Pemerintah Kota Salatiga	01
39	Pemerintah Kota Pekalongan	01
40	Pemerintah Kota Tegal	01
41	Pemerintah Kota Magelang	01
42	Pemerintah Kota Surakarta	01
43	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	02 KANREG SUARABAYA

44	Pemerintah Kab. Gresik	02
45	Pemerintah Kab. Mojokerto	02
46	Pemerintah Kab. Sidoarjo	02
47	Pemerintah Kab. Jombang	02
48	Pemerintah Kab. Sampang	02
49	Pemerintah Kab. Pamekasan	02
50	Pemerintah Kab. Sumenep	02
51	Pemerintah Kab. Bangkalan	02
52	Pemerintah Kab. Bondowoso	02
53	Pemerintah Kab. Situbondo	02
54	Pemerintah Kab. Banyuwangi	02
55	Pemerintah Kab. Jember	02
56	Pemerintah Kab. Malang	02
57	Pemerintah Kab. Pasuruan	02
58	Pemerintah Kab. Probolinggo	02
59	Pemerintah Kab. Lumajang	02
60	Pemerintah Kab. Kediri	02
61	Pemerintah Kab. Tulungagung	02
62	Pemerintah Kab. Nganjuk	02
63	Pemerintah Kab. Trenggalek	02
64	Pemerintah Kab. Blitar	02
65	Pemerintah Kab. Madiun	02
66	Pemerintah Kab. Ngawi	02
67	Pemerintah Kab. Magetan	02
68	Pemerintah Kab. Ponorogo	02
69	Pemerintah Kab. Pacitan	02
70	Pemerintah Kab. Bojonegoro	02
71	Pemerintah Kab. Tuban	02
72	Pemerintah Kab. Lamongan	02
73	Pemerintah Kota Surabaya	02
74	Pemerintah Kota Mojokerto	02
75	Pemerintah Kota Malang	02
76	Pemerintah Kota Pasuruan	02
77	Pemerintah Kota Probolinggo	02
78	Pemerintah Kota Blitar	02
79	Pemerintah Kota Kediri	02
80	Pemerintah Kota Madiun	02
81	Pemerintah Kota Batu	02
82	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	03 KANREG BANDUNG
83	Pemerintah Kab. Bogor	03
84	Pemerintah Kab. Sukabumi	03
85	Pemerintah Kab. Cianjur	03
86	Pemerintah Kab. Bekasi	03
87	Pemerintah Kab. Karawang	03
88	Pemerintah Kab. Purwakarta	03
89	Pemerintah Kab. Subang	03
90	Pemerintah Kab. Bandung	03
91	Pemerintah Kab. Sumedang	03

92	Pemerintah Kab. Garut	03
93	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	03
94	Pemerintah Kab. Ciamis	03
95	Pemerintah Kab. Cirebon	03
96	Pemerintah Kab. Kuningan	03
97	Pemerintah Kab. Indramayu	03
98	Pemerintah Kab. Majalengka	03
99	Pemerintah Kab. Bandung Barat	03
100	Pemerintah Kab. Pangandaran	03
101	Pemerintah Kota Bandung	03
102	Pemerintah Kota Bogor	03
103	Pemerintah Kota Sukabumi	03
104	Pemerintah Kota Cirebon	03
105	Pemerintah Kota Bekasi	03
106	Pemerintah Kota Depok	03
107	Pemerintah Kota Cimahi	03
108	Pemerintah Kota Tasikmalaya	03
109	Pemerintah Kota Banjar	03
110	Pemerintah Provinsi Banten	03
111	Pemerintah Kab. Serang	03
112	Pemerintah Kab. Pandeglang	03
113	Pemerintah Kab. Lebak	03
114	Pemerintah Kab. Tangerang	03
115	Pemerintah Kota Tangerang	03
116	Pemerintah Kota Cilegon	03
117	Pemerintah Kota Serang	03
118	Pemerintah Kota Tangerang Selatan	03
119	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	04 KANREG MAKASSAR
120	Pemerintah Kab. Poso	04
121	Pemerintah Kab. Donggala	04
122	Pemerintah Kab. Tolitoli	04
123	Pemerintah Kab. Banggai	04
124	Pemerintah Kab. Buol	04
125	Pemerintah Kab. Morowali	04
126	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	04
127	Pemerintah Kab. Parigi Moutong	04
128	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	04
129	Pemerintah Kab. Sigi	04
130	Pemerintah Kab. Banggai Laut	04
131	Pemerintah Kab. Morowali Utara	04
132	Pemerintah Kota Palu	04
133	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	04
134	Pemerintah Kab. Pinrang	04
135	Pemerintah Kab. Gowa	04
136	Pemerintah Kab. Wajo	04
137	Pemerintah Kab. Bone	04
138	Pemerintah Kab. Tana Toraja	04
139	Pemerintah Kab. Maros	04

140	Pemerintah Kab. Luwu	04
141	Pemerintah Kab. Sinjai	04
142	Pemerintah Kab. Bulukumba	04
143	Pemerintah Kab. Bantaeng	04
144	Pemerintah Kab. Jeneponto	04
145	Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar	04
146	Pemerintah Kab. Takalar	04
147	Pemerintah Kab. Barru	04
148	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	04
149	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	04
150	Pemerintah Kab. Soppeng	04
151	Pemerintah Kab. Enrekang	04
152	Pemerintah Kab. Luwu Utara	04
153	Pemerintah Kab. Luwu Timur	04
154	Pemerintah Kab. Toraja Utara	04
155	Pemerintah Kota Makassar	04
156	Pemerintah Kota Parepare	04
157	Pemerintah Kota Palopo	04
158	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	04
159	Pemerintah Kab. Konawe	04
160	Pemerintah Kab. Buton	04
161	Pemerintah Kab. Muna	04
162	Pemerintah Kab. Kolaka	04
163	Pemerintah Kab. Konawe Selatan	04
164	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	04
165	Pemerintah Kab. Bombana	04
166	Pemerintah Kab. Wakatobi	04
167	Pemerintah Kab. Buton Utara	04
168	Pemerintah Kab. Konawe Utara	04
169	Pemerintah Kab. Kolaka Timur	04
170	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	04
171	Pemerintah Kab. Buton Selatan	04
172	Pemerintah Kab. Buton Tengah	04
173	Pemerintah Kab. Muna Barat	04
174	Pemerintah Kota Kendari	04
175	Pemerintah Kota Baubau	04
176	Pemerintah Provinsi Maluku	04
177	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	04
178	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	04
179	Pemerintah Kab. Buru	04
180	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara Barat	04
181	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	04
182	Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	04
183	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	04
184	Pemerintah Kab. Buru Selatan	04
185	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	04
186	Pemerintah Kota Ambon	04

187	Pemerintah Kota Tual	04
188	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	04
189	Pemerintah Kab. Pasangkayu	04
190	Pemerintah Kab. Mamuju	04
191	Pemerintah Kab. Mamasa	04
192	Pemerintah Kab. Polewali Mandar	04
193	Pemerintah Kab. Majene	04
194	Pemerintah Kab. Mamuju Tengah	04
195	Pemerintah Provinsi Lampung	05 KANREG DKI JAKARTA
196	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	05
197	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	05
198	Pemerintah Kab. Lampung Utara	05
199	Pemerintah Kab. Lampung Barat	05
200	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	05
201	Pemerintah Kab. Tanggamus	05
202	Pemerintah Kab. Way Kanan	05
203	Pemerintah Kab. Lampung Timur	05
204	Pemerintah Kab. Pesawaran	05
205	Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat	05
206	Pemerintah Kab. Pringsewu	05
207	Pemerintah Kab. Mesuji	05
208	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	05
209	Pemerintah Kota Metro	05
210	Pemerintah Kota Bandar Lampung	05
211	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	05
212	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	05
213	Pemerintah Kab. Sambas	05
214	Pemerintah Kab. Sanggau	05
215	Pemerintah Kab. Sintang	05
216	Pemerintah Kab. Mempawah	05
217	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	05
218	Pemerintah Kab. Ketapang	05
219	Pemerintah Kab. Bengkayang	05
220	Pemerintah Kab. Landak	05
221	Pemerintah Kab. Melawi	05
222	Pemerintah Kab. Sekadau	05
223	Pemerintah Kab. Kubu Raya	05
224	Pemerintah Kab. Kayong Utara	05
225	Pemerintah Kota Pontianak	05
226	Pemerintah Kota Singkawang	05
227	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	06 KANREG MEDAN
228	Pemerintah Kab. Deli Serdang	06
229	Pemerintah Kab. Karo	06
230	Pemerintah Kab. Langkat	06
231	Pemerintah Kab. Tapanuli Tengah	06
232	Pemerintah Kab. Simalungun	06
233	Pemerintah Kab. Labuhanbatu	06

234	Pemerintah Kab. Dairi	06
235	Pemerintah Kab. Tapanuli Utara	06
236	Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan	06
237	Pemerintah Kab. Asahan	06
238	Pemerintah Kab. Nias	06
239	Pemerintah Kab. Toba Samosir	06
240	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	06
241	Pemerintah Kab. Nias Selatan	06
242	Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan	06
243	Pemerintah Kab. Pakpak Bharat	06
244	Pemerintah Kab. Samosir	06
245	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	06
246	Pemerintah Kab. Padang Lawas	06
247	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	06
248	Pemerintah Kab. Batubara	06
249	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	06
250	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Utara	06
251	Pemerintah Kab. Nias Barat	06
252	Pemerintah Kab. Nias Utara	06
253	Pemerintah Kota Medan	06
254	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	06
255	Pemerintah Kota Binjai	06
256	Pemerintah Kota Pematangsiantar	06
257	Pemerintah Kota Tanjungbalai	06
258	Pemerintah Kota Sibolga	06
259	Pemerintah Kota Padangsidempuan	06
260	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	06
261	Pemerintah Provinsi Jambi	07 KANREG PALEMBANG
262	Pemerintah Kab. Batang Hari	07
263	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	07
264	Pemerintah Kab. Bungo	07
265	Pemerintah Kab. Merangin	07
266	Pemerintah Kab. Kerinci	07
267	Pemerintah Kab. Sarolangun	07
268	Pemerintah Kab. Tebo	07
269	Pemerintah Kab. Muaro Jambi	07
270	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Timur	07
271	Pemerintah Kota Jambi	07
272	Pemerintah Kota Sungai Penuh	07
273	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	07
274	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	07
275	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	07
276	Pemerintah Kab. Muara Enim	07
277	Pemerintah Kab. Lahat	07
278	Pemerintah Kab. Musi Rawas	07
279	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	07
280	Pemerintah Kab. Banyuasin	07
281	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	07

	Timur	
282	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	07
283	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	07
284	Pemerintah Kab. Empat Lawang	07
285	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	07
286	Pemerintah Kota Palembang	07
287	Pemerintah Kota Pagar Alam	07
288	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	07
289	Pemerintah Kota Prabumulih	07
290	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	07
291	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	07
292	Pemerintah Kab. Bangka	07
293	Pemerintah Kab. Belitung	07
294	Pemerintah Kab. Bangka Barat	07
295	Pemerintah Kab. Bangka Tengah	07
296	Pemerintah Kab. Bangka Selatan	07
297	Pemerintah Kab. Belitung Timur	07
298	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	07
299	Pemerintah Provinsi Bengkulu	07
300	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	07
301	Pemerintah Kab. Bengkulu Selatan	07
302	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	07
303	Pemerintah Kab. Kaur	07
304	Pemerintah Kab. Seluma	07
305	Pemerintah Kab. Mukomuko	07
306	Pemerintah Kab. Kepahiang	07
307	Pemerintah Kab. Lebong	07
308	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	07
309	Pemerintah Kota Bengkulu	07
310	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	08 KANREG BANJARMASIN
311	Pemerintah Kab. Kapuas	08
312	Pemerintah Kab. Barito Utara	08
313	Pemerintah Kab. Barito Selatan	08
314	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	08
315	Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat	08
316	Pemerintah Kab. Pulang Pisau	08
317	Pemerintah Kab. Gunung Mas	08
318	Pemerintah Kab. Lamandau	08
319	Pemerintah Kab. Sukamara	08
320	Pemerintah Kab. Murung Raya	08
321	Pemerintah Kab. Katingan	08
322	Pemerintah Kab. Seruyan	08
323	Pemerintah Kab. Barito Timur	08
324	Pemerintah Kota Palangka Raya	08
325	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	08
326	Pemerintah Kab. Banjar	08
327	Pemerintah Kab. Tanah Laut	08

328	Pemerintah Kab. Tapin	08
329	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	08
330	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	08
331	Pemerintah Kab. Barito Kuala	08
332	Pemerintah Kab. Tabalong	08
333	Pemerintah Kab. Kotabaru	08
334	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	08
335	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	08
336	Pemerintah Kab. Balangan	08
337	Pemerintah Kota Banjarmasin	08
338	Pemerintah Kota Banjarbaru	08
339	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	08
340	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	08
341	Pemerintah Kab. Paser	08
342	Pemerintah Kab. Berau	08
343	Pemerintah Kab. Kutai Barat	08
344	Pemerintah Kab. Kutai Timur	08
345	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	08
346	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	08
347	Pemerintah Kota Samarinda	08
348	Pemerintah Kota Balikpapan	08
349	Pemerintah Kota Bontang	08
350	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	08
351	Pemerintah Kab. Bulungan	08
352	Pemerintah Kab. Malinau	08
353	Pemerintah Kab. Nunukan	08
354	Pemerintah Kab. Tana Tidung	08
355	Pemerintah Kota Tarakan	08
356	Pemerintah Provinsi Papua	09 KANREG JAYAPURA
357	Pemerintah Kab. Jayapura	09
358	Pemerintah Kab. Biak Numfor	09
359	Pemerintah Kab. Kepulauan Yapen	09
360	Pemerintah Kab. Merauke	09
361	Pemerintah Kab. Jayawijaya	09
362	Pemerintah Kab. Nabire	09
363	Pemerintah Kab. Puncak Jaya	09
364	Pemerintah Kab. Paniai	09
365	Pemerintah Kab. Mimika	09
366	Pemerintah Kab. Boven Digoel	09
367	Pemerintah Kab. Mappi	09
368	Pemerintah Kab. Asmat	09
369	Pemerintah Kab. Yahukimo	09
370	Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang	09
371	Pemerintah Kab. Tolikara	09
372	Pemerintah Kab. Sarmi	09
373	Pemerintah Kab. Keerom	09
374	Pemerintah Kab. Waropen	09
375	Pemerintah Kab. Supiori	09

376	Pemerintah Kab. Mamberamo Raya	09
377	Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah	09
378	Pemerintah Kab. Lanny Jaya	09
379	Pemerintah Kab. Yalimo	09
380	Pemerintah Kab. Nduga	09
381	Pemerintah Kab. Dogiyai	09
382	Pemerintah Kab. Puncak	09
383	Pemerintah Kab. Deiyai	09
384	Pemerintah Kab. Intan Jaya	09
385	Pemerintah Kota Jayapura	09
386	Pemerintah Provinsi Bali	10 KANREG DENPASAR
387	Pemerintah Kab. Buleleng	10
388	Pemerintah Kab. Jembrana	10
389	Pemerintah Kab. Klungkung	10
390	Pemerintah Kab. Gianyar	10
391	Pemerintah Kab. Karangasem	10
392	Pemerintah Kab. Bangli	10
393	Pemerintah Kab. Badung	10
394	Pemerintah Kab. Tabanan	10
395	Pemerintah Kota Denpasar	10
396	Pemerintah Provinsi NTB	10
397	Pemerintah Kab. Lombok Barat	10
398	Pemerintah Kab. Lombok Tengah	10
399	Pemerintah Kab. Lombok Timur	10
400	Pemerintah Kab. Bima	10
401	Pemerintah Kab. Sumbawa	10
402	Pemerintah Kab. Dompu	10
403	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	10
404	Pemerintah Kab. Lombok Utara	10
405	Pemerintah Kota Mataram	10
406	Pemerintah Kota Bima	10
407	Pemerintah Provinsi NTT	10
408	Pemerintah Kab. Kupang	10
409	Pemerintah Kab. Belu	10
410	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	10
411	Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan	10
412	Pemerintah Kab. Alor	10
413	Pemerintah Kab. Sikka	10
414	Pemerintah Kab. Flores Timur	10
415	Pemerintah Kab. Ende	10
416	Pemerintah Kab. Ngada	10
417	Pemerintah Kab. Manggarai	10
418	Pemerintah Kab. Sumba Timur	10
419	Pemerintah Kab. Sumba Barat	10
420	Pemerintah Kab. Lembata	10
421	Pemerintah Kab. Rote Ndao	10
422	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	10
423	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	10

424	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	10
425	Pemerintah Kab. Nagekeo	10
426	Pemerintah Kab. Sumba Tengah	10
427	Pemerintah Kab. Sabu Raijua	10
428	Pemerintah Kab. Malaka	10
429	Pemerintah Kota Kupang	10
430	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	11 KANREG MANADO
431	Pemerintah Kab. Minahasa	11
432	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow	11
433	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	11
434	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	11
435	Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud	11
436	Pemerintah Kab. Minahasa Utara	11
437	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	11
438	Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro	11
439	Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara	11
440	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	11
441	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur	11
442	Pemerintah Kota Manado	11
443	Pemerintah Kota Bitung	11
444	Pemerintah Kota Tomohon	11
445	Pemerintah Kota KotaMobaigu	11
446	Pemerintah Provinsi Gorontalo	11
447	Pemerintah Kab. Gorontalo	11
448	Pemerintah Kab. Boalemo	11
449	Pemerintah Kab. Pohuwato	11
450	Pemerintah Kab. Bone Bolango	11
451	Pemerintah Kab. Gorontalo Utara	11
452	Pemerintah Kota Gorontalo	11
453	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	11
454	Pemerintah Kab. Halmahera Barat	11
455	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	11
456	Pemerintah Kab. Kepulauan Sula	11
457	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	11
458	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	11
459	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	11
460	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	11
461	Pemerintah Kab. Pulau Taliabu	11
462	Pemerintah Kota Ternate	11
463	Pemerintah Kota Tidore Kepulauan	11
464	Pemerintah Provinsi Riau	12 KANREG PEKANBARU
465	Pemerintah Kab. Kampar	12
466	Pemerintah Kab. Bengkalis	12
467	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	12
468	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	12
469	Pemerintah Kab. Pelalawan	12

470	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	12
471	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	12
472	Pemerintah Kab. Siak	12
473	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	12
474	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	12
475	Pemerintah Kota Pekanbaru	12
476	Pemerintah Kota Dumai	12
477	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	12
478	Pemerintah Kab. Agam	12
479	Pemerintah Kab. Pasaman	12
480	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	12
481	Pemerintah Kab. Solok	12
482	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	12
483	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	12
484	Pemerintah Kab. Tanah Datar	12
485	Pemerintah Kab. Sijunjung	12
486	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	12
487	Pemerintah Kab. Solok Selatan	12
488	Pemerintah Kab. Dharmasraya	12
489	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	12
490	Pemerintah Kota Bukittinggi	12
491	Pemerintah Kota Padang Panjang	12
492	Pemerintah Kota Sawahlunto	12
493	Pemerintah Kota Solok	12
494	Pemerintah Kota Padang	12
495	Pemerintah Kota Payakumbuh	12
496	Pemerintah Kota Pariaman	12
497	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	12
498	Pemerintah Kab. Bintan	12
499	Pemerintah Kab. Karimun	12
500	Pemerintah Kab. Natuna	12
501	Pemerintah Kab. Lingga	12
502	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	12
503	Pemerintah Kota Batam	12
504	Pemerintah Kota Tanjungpinang	12
505	Pemerintah Aceh	13 KANREG ACEH
506	Pemerintah Kab. Aceh Besar	13
507	Pemerintah Kab. Pidie	13
508	Pemerintah Kab. Aceh Utara	13
509	Pemerintah Kab. Aceh Timur	13
510	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	13
511	Pemerintah Kab. Aceh Barat	13
512	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	13
513	Pemerintah Kab. Aceh Tenggara	13
514	Pemerintah Kab. Simeulue	13
515	Pemerintah Kab. Bireuen	13
516	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	13
517	Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya	13

518	Pemerintah Kab. Gayo Lues	13
519	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	13
520	Pemerintah Kab. Nagan Raya	13
521	Pemerintah Kab. Aceh Jaya	13
522	Pemerintah Kab. Bener Meriah	13
523	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	13
524	Pemerintah Kota Sabang	13
525	Pemerintah Kota Banda Aceh	13
526	Pemerintah Kota Langsa	13
527	Pemerintah Kota Lhokseumawe	13
528	Pemerintah Kota Subulussalam	13
529	Pemerintah Provinsi Papua Barat	14 KANREG MANOKWARI
530	Pemerintah Kab. Sorong	14
531	Pemerintah Kab. Sorong Selatan	14
532	Pemerintah Kab. Raja Ampat	14
533	Pemerintah Kab. Manokwari	14
534	Pemerintah Kab. Teluk Bintuni	14
535	Pemerintah Kab. Teluk Wondama	14
536	Pemerintah Kab. Fak-Fak	14
537	Pemerintah Kab. Kaimana	14
538	Pemerintah Kab. Tambrau	14
539	Pemerintah Kab. Maybrat	14
540	Pemerintah Kab. Pegunungan Arfak	14
541	Pemerintah Kab. Manokwari Selatan	14
542	Pemerintah Kota Sorong	14